

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Ghosfur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2013
- Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana: Jakarta. 2012.
- Andi Muhammad Alvi Nareza Caesar, *Efektivitas Pengawasan Pembuatan Akta Jaminan Fidusia*, Thesis, Universitas Hasanuddin, 2018
- Astuti Aksan, Tesis berjudul *Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Universitas Hasanuddin, 2015
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 2003
- Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mitra Buana Media, Yogyakarta, 2020
- Kadaruddin, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum*, Semarang, Formaci, 2021
- Nila Amalia, *Kewajiban Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa Oleh Notaris Sebagai Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Rencana Tesis, Universitas Hasanuddin, 2023
- Ratna Madyastuti, *Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan Dan Tugas Jabatan Notaris*, Lex Renaissance No.3 Vol.5, Yogyakarta,
- Rian Achmad Perdana, *Penelitian Hukum Interdisipliner*, Yogyakarta, Thafa Media, 2016
- Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
- Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2011

Jurnal

Endah Rantau Itasari, *Kepatuhan Hukum Negara Indonesia Terhadap ICESCR*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2, Universitas Tanjung Putra Pontianak

Muhammad Fuat Widyaiswara Utama pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, *Mengenali Proses Pencucian Uang (Money Laundering) Dari Hasil Tindak Pidana*, hal. 10

Mutia Karina Norman, *Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (Pmpj) Bagi Notaris Dalam Rangka Mutual Evaluation Review (Mer) Financial Action Task Force (Fatf) Terhadap Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol 7 No.1, 2023

Rafly Rilandy Puasa *et al*, *Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro*, Jurnal Eksekutif Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol.1 No.1, Universitas Sam Ratulangi Manado, 2018.

Ricky Wie Lawa, *Perlindungan Hukum Bagi Notaris yang Menjalankan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa*, Jurnal Proyuris Vol. 3 No. 1, Universitas Narotama, 2021

Sri Endah Wahyuningsih dan Rismanto, *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Pembaharuan Hukum

Triyana Handayani, Felicitas Sri Marniati, Andrea Septiyan, *Efektivitas Pengawasan Majelis Pengawas Daerah dalam Mengurangi Pelanggaran Notaris Terhadap Pelaksanaan Jabatannya*, Jurnal Nuansa Kenotariatan Vol. 4 No.2, 2019

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tidak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris

Surat Edaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.UM.01.01-1239 tanggal 16 September 2019 Tentang Panduan Pengawasan Kepatuhan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan Pelaporan Ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Bagi Notaris.

Surat Edaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.UM.01.01-1232 tanggal 16 September 2016 Tentang Panduan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris

Wawancara Narasumber

Andi Fachruddin, Sekretaris MPD Kota Makassar pada tanggal 27 Juli

2023

Notaris Dr. Ria Trisnomurti, SH, Mkn pada tanggal

Notaris Widartiningsih, SH pada tanggal 26 Juli 2023

Notaris Hustam Husein, SH, MKn pada tanggal 1 Agustus 2023

Notaris H. Wahbah Latief, SH, Mkn pada tanggal 28 Juli 2023

Notaris Tjin Jefri Tanwil, SH, Mkn pada tanggal 2 Agustus 2023

Notaris Dr. Abdul Muis, SH. MH pada tanggal 1 Agustus 2023

Lain-lain

Asep Nursobah, *Glosarium Hukum Pencucian Uang*,
<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/>

Anonim, ntb.kemenkumham.go.id., MPW dan MPD Notaris

Anonim, *Melalui Majelis Pengawas Daerah, Kemenkumham Aceh Lakukan Pemeriksaan Berkala Notaris di Kabupaten Pidie*, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia Aceh, 25-05-2-23

Anonim, *Pelaku Pencucian Uang Memanfaatkan Akta Notaris sebagai Legal Standing*, Kantor Wilayah Kemetrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat

Saiful Alam dan Partner, *Kedudukan Surat Edaran Menteri Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Legal Opinion

Anonim, *Pelimpahan Wewenang Atribusi, Delegasi, Mandat*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Gerry Fischer Silihitonga, *Asas lex superior derogate legi inferiori dan Kedudukan Surat Edaran dalam Perundang-undangan*, Artikel Kemenkumham

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, <https://www.academia.edu/>

Solehuddin, *Pelanggar Surat Edaran, Bisahkan Diproses Hukum oleh Polisi?*, Hukum Online

LAMPIRAN